

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN APBD PADA SKPD KABUPATEN BULELENG

Kadek Desy Swandewi¹, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: desy.swandewi@undiksha.ac.id ayu.wulan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh pejabat terkait dengan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Penentuan sampel menggunakan metode sensus, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu berjumlah 177 orang pejabat. Data penelitian diperoleh dari pendistribusian dan pengumpulan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda, uji t, dan koefisien determinasi dengan SPSS Versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, (3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, (4) Partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi Publik

Abstract

This research aims to partially examine the effect of accountability, transparency, control, and public participation on the management of the APBD at the SKPD of Buleleng Regency. This research is a quantitative research used primary data. The population of this research is all officials related to APBD at SKPD Buleleng Regency. Determination of the sample used the census method, so the number of samples used in this study were all of the population which amounted 177 officials. Research data obtained from the distribution and collection of questionnaires. The data analysis techniques used in this research were descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing with multiple regression analysis, t test, and coefficient of determination with SPSS Version 26. The results showed that: (1) Accountability has a positive effect on the management of the APBD in the SKPD of Buleleng Regency, (2) Transparency has a positive effect on the management of the APBD on the SKPD of Buleleng Regency, (3) Control has a positive effect on the management of the APBD on the SKPD of Buleleng Regency, (4) Public participation has no effect on the management of the APBD in SKPD Buleleng Regency.

Keywords : Accountability, Transparency, Control, Public Participation

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menciptakan pengelolaan

anggaran atau APBD yang baik atau disebut juga good financial governance (Mayasari 2012). Pada pelaksanaannya, dari banyak berita di media massa atau bahkan opini masyarakat, departemen

pemerintahan mendapat sorotan sebagai organisasi yang sarat akan korupsi dan atau inefisiensi karena memiliki wewenang yang begitu besar. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di negara ini.

Dari beberapa media berita yang diamati, menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng mengalami beberapa masalah atau kasus mengenai pengelolaan keuangan daerah utamanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada 23 Maret 2021 terjadi tindak pidana korupsi sewa rumah jabatan Sekda Kabupaten Buleleng.
2. Pada 6 Oktober 2021 terjadi korupsi Dana Hibah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dampak Covid-19 senilai Rp738 juta oleh mantan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng beserta oknum lainnya.
3. Pada 20 Desember 2021 terjadi Kasus suap senilai Rp16 Milyar yang dilakukan oleh Mantan Sekda Buleleng.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola keuangan atau anggaran dengan baik oleh pemerintah daerah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang seharusnya melakukan tugas dan fungsinya secara baik demi keberlangsungan pengelolaan urusan pemerintah daerah yang efektif dan juga efisien. Salah satu faktor penentu suatu organisasi berjalan dengan baik adalah adanya kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, merata, dan seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sebagai negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi secara tepat, cepat, dan lengkap atas kinerja pemerintah.

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan atau agency theory merupakan hubungan antara dua pihak yakni pemilik atau principal dan manajemen atau agent. Sehingga dalam hubungannya dengan

pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Iznillah (2018) dalam artikelnya menyatakan bahwa teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori keagenan juga memandang bahwa banyak kemungkinan terjadi asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal. Adanya asimetri informasi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus penyelewengan atau korupsi, dan tindak kecurangan lainnya.

Berbagai penelitian mengenai pengelolaan anggaran atau APBD telah dilakukan dengan hasil yang tidak konsisten atau berbeda-beda. Sudewi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2018) yaitu Value for money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas keuangan daerah mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Alfarizi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan transparansi, dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Adiwirya (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran, sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, Widiartari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang atau fenomena yang telah dipaparkan di atas, serta tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Partisipasi Publik terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng".

Menurut Halim (2014), akuntabilitas mengandung arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudewi (2017), Wandari, dkk (2015), Ramdhani (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran yang artinya apabila akuntabilitas semakin tinggi maka pengelolaan anggaran juga semakin baik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Menurut Mursyidi (2009), transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya informasi yang memadai mengenai pengelolaan APBD, akan memenuhi hak masyarakat atau publik untuk mengetahui secara

menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan sehingga tidak ada kecenderungan terjadinya kecurangan dan kesalahan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2017), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sriwijayanti (2018), Syahputra (2018), Wandari, dkk (2015) yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD baik secara parsial maupun simultan. Apabila semakin tinggi transparansi, maka semakin baik pula pengelolaan APBD. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan:

H2: Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, dalam instansi pemerintahan pengawasan terhadap keuangan daerah atau APBD sangat diperlukan untuk dapat memastikan segala hal perencanaan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dapat didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2017), Syahputra (2018), Wandari, dkk (2015), Tuko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran atau keuangan daerah. Berdasarkan uraian dan konsep-konsep di atas, menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan APBD berbanding lurus. Apabila semakin semakin baik penerapan pengawasan, akan semakin baik pula pengelolaan APBD. Sehingga berdasarkan konsep-konsep di atas

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H3: Pengawasan Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Partisipasi publik mengandung makna adanya suatu keterlibatan publik atau masyarakat dalam aktivitas penganggaran keuangan daerah. Pada dasarnya terdapat tiga elemen penting yang menjadi penentu kinerja pengelolaan keuangan daerah yakni stakeholder (masyarakat baik secara langsung maupun diwakili oleh civil society organization), Pemerintah Daerah, dan DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat anggaran daerah atau APBD yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Werimon, 2005). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriandini, (2021) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran OPD Kota Surabaya. Widiantari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian yang serupa juga diperoleh dari penelitian Febria (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial dalam pengelolaan APBD. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H4: Partisipasi Publik Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan bersumber dari data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pengelola keuangan daerah yang terdiri dari 177 orang pejabat dari keseluruhan SKPD Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 38 instansi pemerintahan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan metode sensus sehingga seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas yang digunakan terdiri dari variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik. Sedangkan variabel terikat adalah pengelolaan APBD.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sriwijayanti, 2018). Akuntabilitas diukur dengan indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran; akuntabilitas proses; akuntabilitas program; akuntabilitas kebijakan.

Variabel selanjutnya adalah transparansi, yaitu adanya informasi keuangan pemerintah daerah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat sehingga terdapat kebebasan dalam mengakses informasi tersebut sebagai aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi diukur dengan indikator publikasi kebijakan publik; informasi yang disajikan; penanganan keluhan.

Variable selanjutnya adalah pengawasan, yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kepres No. 74, 2001). Pengawasan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Pengawasan diukur dengan indikator yaitu masukan (input) pengawasan; proses pengawasan; keluaran (output) pengawasan

Variabel bebas yang terakhir adalah partisipasi publik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, bahkan pelaksanaan

anggaran. Partisipasi publik diukur dengan indikator keterlibatan unsur masyarakat/publik; peran masyarakat; jangka waktu penyusunan anggaran; upaya pemerintah; penjangkaran aspirasi publik.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengelolaan APBD, yaitu kegiatan pengelolaan anggaran oleh SKPD secara ekonomis, efektif, efisien, adil, dan merata. Rangkaian kegiatan pengelolaan APBD oleh SKPD sebagai penggunaan keuangan daerah untuk pelayanan publik terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan APBD diukur dengan indikator ketepatan waktu;

koordinasi; rentang manajemen; target dan sasaran; produktivitas.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan interval nilai 1 sampai dengan 5 dengan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Adapun beberapa pengujian yang dilakukan pada penelitian ini antara lain adalah melakukan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), serta uji hipotesis (uji regresi linier berganda, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rincian Pendistribusian dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	177
Kuesioner yang tidak Kembali	(5)
Kuesioner yang Kembali	172
Kuesioner yang tidak lengkap diisi	(0)
Kuesioner yang dapat digunakan	172
Tingkat pengembalian kuesioner (<i>response rate</i>) (172/177) x 100%	97%
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>usability response rate</i>) (172/177) x 100%	97%

Sumber: data primer diolah (2022)

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa dari 177 kuesioner yang disebar terdapat 5 kuesioner yang tidak kembali. Kuesioner yang tidak kembali tersebut adalah kuesioner yang disebar pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Alasannya adalah pihak Dinas Pariwisata tidak dapat memberikan data berupa jawaban pengisian kuesioner yang berkaitan dengan pengelolaan APBD. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian responden yang diperlukan masih dalam proses pemulihan kondisi mental akibat kasus yang terjadi pada Dinas Pariwisata. Sedangkan sebagian responden lainnya adalah pejabat atau pegawai baru sebagai pengganti dari oknum yang diberhentikan karena kasus tersebut sehingga belum bisa memberikan keterangan mengenai pengelolaan APBD pada Dinas Pariwisata.

Dari 172 kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini, data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	98	57
		Perempuan	74	43
		Jumlah	172	100
2.	Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	11	6
		Diploma	31	18
		S1	111	65
		S2	19	11
		Jumlah	172	100
3.	Lama Bekerja	< 5 tahun	27	16
		5-10 tahun	52	30
		> 10 tahun	93	54
		Jumlah	172	100
4.	Jabatan	PA/KPA	37	21,5
		PPTK	37	21,5
		PPK	37	21,5
		Bend. Penerimaan	24	14
		Bend. Pengeluaran	37	21,5
		Jumlah	172	100

Sumber: data primer diolah (2022)

Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif meliputi skor minimum, maximum, mean (rata-rata) dan standard deviation sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil analisis statistik deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	172	13	22	18.41	2.714
Transparansi (X2)	172	15	23	19.01	1.814
Pengawasan (X3)	172	17	25	21.72	1.995
Partisipasi Publik (X4)	172	16	25	21.23	2.382
Pengelolaan APBD (Y)	172	18	30	25.50	2.788
Valid N (listwise)	172				

Sumber: Data primer diolah (2022)

Dari data tersebut, seluruh variabel memiliki nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga ini mengindikasikan rendahnya penyimpangan data. Penyimpangan data yang rendah menunjukkan bahwa penyebaran nilai data sudah merata.

Selanjutnya dilakukan uji validitas yang digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner dalam mendefinisikan variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearsons Correlation dengan program IBM SPSS Statistics 26. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai r hitung > r tabel (Ghozali, 2011). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 172 responden dengan dengan taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05 sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1258. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, nilai r hitung pada semua butir pertanyaan masing-masing variabel lebih besar daripada r tabel. Sehingga, seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid dan

dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Setelah dilakukan uji validitas lalu dilakukan uji reliabilitas. Suatu variabel

dinyatakan reliabel apabila memberikan nilai Alpha Cronbach > 0,70 (Ghozali,2011).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standard Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)	0,806	0,70	Reliabel
2	Transparansi (X2)	0,741	0,70	Reliabel
3	Pengawasan (X3)	0,718	0,70	Reliabel
4	Partisipasi Publik (X4)	0,859	0,70	Reliabel
5	Pengelolaan APBD (Y)	0,844	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki Alpha Cronbach lebih besar dari 0,70 sehingga dinyatakan reliabel. Hal tersebut berarti bahwa setiap variabel tersebut dianggap mampu memberikan hasil pengukuran yang bisa dipercaya dan menghasilkan data yang konsisten meskipun digunakan berkali-kali untuk mengukur suatu objek.

Selanjutnya uji normalitas, digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan taraf signifikansi 5%. Data berdistribusi normal merupakan data yang mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas data disajikan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstd. Residual
N		172
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98823488
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.031
	Negative	-.063
Test Statistic (K-S).		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.098

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,098. Jadi, dengan nilai tersebut maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Adapun hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinerarity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas (X1)	0,654	1,528	Bebas Multikolinieritas
Transparansi (X2)	0,408	2,453	Bebas Multikolinieritas
Pengawasan (X3)	0,400	2,500	Bebas Multikolinieritas
Partisipasi Publik (X4)	0,721	1,388	Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan hasil bahwa nilai tolerance pada setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi korelasi

diantara variabel independen sehingga terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.634	1000		-.634	.527
Akuntabilitas (X1)	-.063	.038	-.156	-1.679	.095
Transparansi (X2)	.141	.072	.232	1.965	.051
Pengawasan (X3)	-.002	.066	.003	-.025	.980
Partisipasi Publik (X4)	.025	.041	.054	.604	.546

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi, model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.625	1.638		1.603	.111
Akuntabilitas (X1)	.321	.062	.313	5.196	.000
Transparansi (X2)	.548	.117	.356	4.670	.000
Pengawasan (X3)	.382	.108	.273	3.546	.001
Partisipasi Publik (X4)	-.082	.067	-.070	-1.219	.224

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel 8, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berikut:

$$Y = 2.625 + 0.321X_1 + 0.548X_2 + 0.382X_3 + (-0.082) X_4 + 1.638$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas, yaitu konstanta memiliki nilai positif yaitu 2.625, yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan (X3), partisipasi Publik (X4) bernilai 0. Maka, variabel pengelolaan APBD (Y) memiliki nilai 2.625 satuan. Akuntabilitas memiliki koefisien regresi senilai 0.321. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1

satuan pada akuntabilitas dapat meningkatkan pengelolaan APBD sebesar 0.321 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Transparansi memiliki koefisien regresi senilai 0,548. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada transparansi dapat meningkatkan pengelolaan APBD sebesar 0,548 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Pengawasan memiliki koefisien regresi senilai 0.382. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada pengawasan dapat meningkatkan pengelolaan APBD sebesar 0.382 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Partisipasi

publik memiliki koefisien regresi senilai - 0.082. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada partisipasi publik, maka pengelolaan APBD mengalami penurunan sebesar 0.082 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Dilanjutkan dengan uji hipotesis berdasarkan tabel 9, variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.196 dan signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $<$ 0,05. Artinya, variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**, yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil pengujian hipotesis kedua terlihat variabel transparansi (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.670 dan signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $<$ 0,05. Artinya, variabel transparansi mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H2 diterima**, yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil pengujian hipotesis ketiga terlihat variabel pengawasan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3.546 dan signifikansi 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $<$ 0,05. Artinya, variabel pengawasan mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**, yaitu pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil pengujian hipotesis keempat terlihat variabel partisipasi publik memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1.219 dan signifikansi 0.224. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} dan nilai signifikansi $>$ 0,05. Artinya, variabel partisipasi publik mempunyai pengaruh dan hubungan yang tidak searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa **H4 ditolak**, yaitu partisipasi tidak berpengaruh

terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.594	1.776

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang dilihat dari *Adjusted R Square* yaitu senilai 0,594. Hal ini menunjukkan bahwa 59,4% pengelolaan APBD dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik. Sedangkan sisanya yaitu 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengelolaan APBD.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Berdasarkan jawaban responden yang telah ditabulasi, secara garis seluruh indikator pengukuran dalam variabel ini telah terpenuhi. Hal tersebut mendukung aspek teori keagenan (*agency theory*) yang mencakup tentang hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat atau publik sebagai principal, dengan adanya akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah untuk memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas pengelolaan APBD kepada masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudewi (2017), Wandari

(2015), Ramdhani (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang artinya apabila akuntabilitas semakin tinggi maka pengelolaan anggaran juga semakin baik. Dalam pengelolaan APBD diperlukan akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel transparansi mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, Berdasarkan jawaban responden yang telah ditabulasi, dapat dianalisis seluruh indikator pengukuran dalam variabel ini telah terpenuhi. Hal tersebut mendukung aspek teori keagenan, transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan APBD akan memenuhi hak masyarakat atau publik untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD yang telah dipercayakan sehingga tidak ada kecenderungan terjadinya kecurangan dan juga kesalahan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dari Sudewi (2017), Sriwijayanti (2018), Syahputra (2018), Wandari, dkk (2015) yaitu transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik pula pengelolaan APBD.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pengawasan mempunyai pengaruh dan hubungan yang searah terhadap pengelolaan APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Berdasarkan jawaban responden yang

telah disajikan dalam tabulasi data, dapat dianalisis seluruh indikator pengukuran dalam variabel ini telah terpenuhi. Hal tersebut mendukung aspek teori keagenan yang didalamnya menyatakan adanya asumsi sifat manusia yang mementingkan diri sendiri atau *self interest*. Maka dengan adanya pengawasan, tentunya dapat mencegah atau meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di antara prinsipal dan agen. Semakin baik pengawasan maka semakin baik pula sistem pengelolaan keuangan daerah atau APBD oleh prinsipal.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudewi (2017), Syahputra (2018), Wandari, dkk (2015), Tuko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah atau APBD. Sehingga apabila tingkat pengawasan tinggi, maka dapat mendorong dalam pengelolaan anggaran atau APBD yang lebih baik.

Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel partisipasi publik (X4) mempunyai pengaruh dan hubungan yang tidak searah terhadap pengelolaan APBD (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yaitu partisipasi (X4) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD (Y).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriandini (2021) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran OPD Kota Surabaya. Widiartari (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD. Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian

ini yaitu penelitian oleh Merina, dkk (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD). Safi, dkk (2018) menyatakan bahwa menciptakan orientasi anggaran ke arah kesejahteraan rakyat diperlukan penganggaran yang partisipatif (*participatory budgeting*). *Participatory budgeting* merupakan proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Namun apabila diamati dan dianalisis kembali hasil jawaban kuesioner yang disebar, pada variabel partisipasi publik terdapat beberapa responden yang memilih netral atau ragu-ragu terhadap pernyataan bahwa kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan prioritas APBD. Sehingga hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pada SKPD Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menjadikan peran partisipasi publik sebagai salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan yaitu hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng, partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. Dari hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu: (1) Bagi Kepala Instansi SKPD Kabupaten Buleleng diharapkan seluruh kepala instansi SKPD Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan dan memaksimalkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah atau APBD sebagai sumber daya publik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) Bagi Pejabat Pengelola APBD, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD, diharapkan seluruh pejabat pengelola APBD menanamkan prinsip tersebut dalam setiap tindakan pengelolaan APBD serta lebih meningkatkan kesadaran diri sebagai pihak yang diberi kepercayaan sebagai pengelola APBD agar dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kembali kasus-kasus penyelewengan dan kecurangan terhadap keuangan daerah atau APBD yang dilakukan oleh pejabat pengelola APBD itu sendiri; (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat melakukan penelitian sejenis namun dilakukan pada instansi SKPD pada wilayah lain yang memiliki potensi terjadinya kasus serupa dan mengambil responden yang berbeda sebagai pembandingan hasil penelitian serta alangkah lebih baik apabila selain menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui wawancara. Hal tersebut kemungkinan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada responden yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 611–628.
- Alfarizi, S., & Juniarti. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bekasi (Periode Tahun 2015-2018)*. 1, 1–24.
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan*

Dan Bisnis, 14(1), 37–44.

89–101.

- Fitriandini. (2021). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran OPD Pemerintah Kota Surabaya*. UPN Veteran.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Empat)*. Salemba Empat.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 30–41.
- Mayasari, R. P. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Kompetitif*, 1(1), 1–113.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ramdhani, M. R. A. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sriwijayanti, H. (2018). DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK*, 7(1),
- Sudewi, N. (n.d.). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Syahputra, R. A. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Sumatera Utara.
- Tuko, K. (2020). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU. *E-Journal Untag*, 1(2).
- Wandari, D. N. T., Sujana, E., & Putra, I. M. P. (2015). ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Akuntansi*, 3(1).
- Werimon, S. (2005). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* (Issue November). Universitas Diponegoro.
- Widiantari, K. G. (2019). *Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sistem Reward, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Berbasis Kinerja pada SKPD Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.